

## PLURALISME AGAMA DAN PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

**M. Yusuf Wibisono**

Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. A.H. Nasution 105 Cibiru, Bandung 40614, Indonesia.

E-mail: yoeswibi@gmail.com

---

### Abstract

The Religions it primarily teaches about human values, the science that shows the values of humanity, namely pluralism, the pluralism is a continuation of the moral attitude of tolerance and coexistence. If the tolerance is a modest habit of respecting differences on the surface, while coexistence is to accept the existence of other parties, but not curb conflicts. While pluralism is the spirit of mutual protection and equal endorse and develops a sense of brotherhood among people both as individuals and groups. So that there is cooperation to build universal human values, and provide the same opportunity to others, especially his civil rights on behalf of the citizens of the nation, as well as citizens of the world. There is also indicated its universality. Islam as a religion that upholds present high values of pluralism, according to the Islamic of spirit liberation became an essential part of Islam by giving priority to do real basis for peaceful coexistence and justice or competing in goodness, (*fastabiq-û'l-khayr-ât*). In Al-Quran (109: 1-6). And to the attitude of pluralism, the need for dialogue, it is meant to discuss in addition to the equation, also the difference in order to find common ground with each other. The dialogue process in a manner that makes sense and still upholds the dignity and honor of each as a form of recognition of pluralism (diversity). According to Glock and Stark that is not easy to measure the religiosity of a person or community (Ummah) on any religion, because it is also necessary to pay attention to -things such as membership, belief in the religious doctrine, ethics and morality, views and ways of life.

### Keywords:

*Coexistensi religion; pluralism; religious; democratic; dialog*

---

### Abstrak

Agama-agama pada dasarnya mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, ilmu yang mengajarkan nilai-nilai tentang kemanusiaan yaitu pluralisme, Pluralisme pada dasarnya kelanjutan dari sikap toleransi moral dan koeksistensi. Jika sikap toleransi itu adalah kebiasaan menghargai perbedaan sekedarnya dipermukaan, sementara koeksistensi ialah menerima keberadaan pihak lain, tetapi tidak mengekang munculnya konflik. Sementara pluralisme ialah spirit untuk saling mengabsahkan kesetaraan dan melindungi dan mengembangkan rasa persaudaraan di antara sesama manusia baik sebagai pribadi maupun kelompok. sehingga terjalin kerja sama demi membangun nilai-nilai kemanusiaan universal, dan memberikan kesempatan (opportunity) yang sama kepada pihak lain khususnya hak-hak sipilnya atas nama warga bangsa, maupun warga . Disitu pula mengindikasikan universalitasnya. Islam hadir sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai pluralisme, menurut Islam spirit pembebasan menjadi bagian yang terpenting dalam Islam dengan mengutamakan berbuat kebajikan secara koeksistensi damai, dan berkeadilan atau berlomba-lomba dalam kebaikan, (*fastabiq-û'l-khayr-ât*). Dalam Al-Quran (109:1-6). Dan untuk terjadinya sikap pluralisme maka perlu adanya dialog, yang dimaksudkan adalah membicarakan selain persamaan, juga perbedaannya dalam rangka melacak titik temu antar satu sama lain. Proses dialognya pun dengan cara yang masuk akal dan tetap menjunjung tinggi martabat dan kehormatan masing-masing sebagai wujud pengakuan kemajemukan (kebhinekaan). Menurut Glock dan Stark bahwa tidak mudah mengukur religiusitas seseorang ataupun komunitas (umat) pada setiap agama, sebab perlu pula memperhatikan hal-hal seperti: keanggotaan, kepercayaan pada doktrin agama, etika dan moralitas, pandangan dan cara hidup mereka.

### Kata Kunci:

*Koeksistensi agama; pluralism; pluralisme agama; demokratis; dialog.*

---

## A. PENDAHULUAN

Salah satu unsur asasi dalam setiap agama adalah kesatuan konsep kemanusiaan, setelah konsep ketuhanan. Ketika agama-agama itu mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, disitu pula mengindikasikan universalitasnya. Dalam perspektif Islam, agama-agama yang menghadirkan nilai kemanusiaan menandakan "benang merah" bahwa antar satu agama dengan agama lain bermula dari sumber yang sama yaitu dari Sang Pencipta (QS.21:92)<sup>1</sup>. Kesamaan itu dari konsep Ke-Maha Tunggalan Sang Pencipta (QS.23:52).<sup>2</sup> Setiap agama memiliki esensi yang serupa yaitu mengajarkan tentang kasih sayang, perdamaian, dan keadilan (QS.42:13)<sup>3</sup>

Selain itu, sikap mengakui keberagaman agama lain ialah bagian dari perintah Allah (QS.109:1-6). Perilaku seperti inilah yang bisa dikategorikan sebagai pluralisme. Pluralisme bukan saja mengisyaratkan adanya sikap sanggup dan bersedia mengakui hak agama lain untuk eksis, tapi juga berisi makna kesediaan berlaku adil terhadap mereka atas dasar mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki (QS.60:8).<sup>4</sup>

Pluralisme pada dasarnya kelanjutan dari sikap toleransi moral dan koeksistensi. Jika sikap toleransi itu adalah kebiasaan menghargai perbedaan sekedarnya dipermukaan, sementara koeksistensi adalah menerima eksistensi pihak lain, tetapi tidak mengekang

<sup>1</sup> "Sungguh, (agama Tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah" (QS.Al-Anbiya (21):92)

<sup>2</sup> "Dan sungguh, (agama Tauhid) inilah agama kamu, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu

<sup>3</sup> "... Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah dan Aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya lah kita kembali" (QS. Asyura (42): 13). "

<sup>4</sup> "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil". (QS. Al-Mumtahanah (60): 8)

munculnya konflik. Sementara pluralisme ialah, semangat untuk saling melindungi, mengabsahkan kesetaraan, dan mengembangkan rasa persaudaraan di antara sesama manusia baik itu sebagai pribadi maupun kelompok. Di samping itu pula, semangat pluralisme mengedepankan kerja sama demi membentuk nilai-nilai kemanusiaan universal, dan memberikan kesempatan yang sama terhadap pihak lain terutama hak-hak sipilnya atas nama warga bangsa, maupun warga dunia.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pluralisme Menurut Islam

Dalam Islam, pluralisme merupakan:

a. Mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*checks and balances*). QS.Al-Baqarah (2):51 "Sekiranya Tuhan tidak menahan satu golongan terhadap golongan lain, niscaya bumi ini akan musnah. Tetapi Tuhan penuh karunia atas semesta alam"

Maksudnya, pada dasarnya manusia selalu dalam keadaan ingin saling menundukkan satu sama lain, yakni sikap menguasai dan hegemoni. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan arahan untuk saling mengendalikan hasrat menguasai dan hegemoni dengan mekanisme pengawasan melewati para utusan-Nya. Tuhan menurunkan utusan-Nya (Nabi, atau agamawan) sebagai pengatur mekanisme pengawasan supaya tidak terjadi hegemoni antar sesama manusia. Selain pengawasan, dibutuhkan pula pengimbangan antar sesama manusia untuk menjaga keutuhan bumi dan merupakan salah satu wujud ke-Mahamurahan Tuhan terhadap umat manusia. Rekayasa Tuhan untuk saling mengimbangi sekelompok manusia dengan kelompok lainnya, supaya terjadi ketertiban sosial dan terhindar dari kemusnahan bumi. Alhasil, semangat pluralisme menjadi bagian terpenting untuk seluruh umat manusia sebagai modal koeksistensi damai antar mereka. Oleh sebab itu, pluralisme adalah sebuah proses hukum alam (*Sunatullah*) yang tidak akan pernah berubah dan tidak mungkin diabaikan ataupun dihindari.

- b. Kehendak Tuhan akan perbedaan. (a) QS. Al-Maidah (5):48. *“Kalaulah Tuhan menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (golongan) saja, tetapi Tuhan hendak menguji kamu akan karunia (perbedaan) yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Tuhan kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan”*. (b) QS. Ibrahim (14): 4. *“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa (budaya) kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka...”*

Pada dasarnya agama-agama memiliki esensi yang sama, terutama yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan. Namun dalam konteks tertentu, Tuhan pun menetapkan jalan (*syariah*) dan cara (*minhaj*) yang berbeda-beda. Secara teologis perbedaan ini dikehendaki oleh Tuhan sesuai dalam Al-Quran (5:48). Dengan perbedaan itu, Tuhan menginginkan satu sama lain saling berlomba-lomba dalam kebaikan yang pada gilirannya saling menebarkan kasih sayang dan kebaikan. Pada akhirnya, nanti hanya Tuhan lah tempat kembali seluruh umat manusia dan sekaligus yang akan memaparkan hakikat adanya perbedaan-perbedaan itu. Dengan begitu, bukan hanya kesatuan semata yang menjadi esensi agama-agama, tetapi distingsi pun ialah kenyataan yang harus dihormati dan diakui, bahkan dikembangkan untuk kebaikan bersama. Karena, tidak mungkin Tuhan menciptakan persamaan saja tanpa perbedaan. Filosofinya, sebab dengan perbedaanlah bisa membedakan antara Sang Pencipta (Khaliq) dengan yang diciptakan (makhluk).

Seperti halnya distingsi yang terkait dengan ritus dan simbol-simbol keagamaan, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa setiap umat telah ditetapkan oleh Tuhan dalam hal ritual-ritual keagamaan atau *mansak* (jamak: *manasik*)

yang harus mereka laksanakan (QS.22:34 & 67).<sup>5</sup> Menurut Budi Munawar Rahman, setiap umat mempunyai *wijjah* (titik “orientasi”, tempat mengarahkan diri), yang disimbolkan dalam konsep tentang tempat suci, waktu suci, hari suci dan seterusnya. Konsep ini dipopulerkan dalam fenomenologi agama sebagai “Gagasan tentang Yang Suci” oleh Mircea Eliade.<sup>6</sup>

Jadi, disini ada argumen untuk “kesatuan” dan “keberbedaan” agama-agama sekaligus. Dan keduanya mempunyai makna yang penting dalam menyelesaikan masalah hubungan antaragama.<sup>7</sup> Untuk itu, tidak menjadi kewajiban menetapkan kesamaan dalam hal ritual keagamaan diantara agama-agama yang ada. Distingsi-distingsi tersebut bisa dikelola menjadi bagian dari dinamika seiring ragam corak budaya masing-masing agama dilahirkan. Hal ini seiring dengan ajaran Islam yang mempertegas bahwa Tuhan mengirim rasul dan nabinya melainkan dengan bahasa (budaya) kaumnya (QS. (14) Ibrahim:4). Artinya, perbedaan mungkin saja disebabkan pengaruh budaya lokal yang

<sup>5</sup> *“Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (qurban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserahdirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)”* (QS. Al-Hajj (22):34).

<sup>6</sup> *“Bagi setiap umat telah Kami tetapkan syariat tertentu yang (harus) mereka amalkan, maka tidak sepatutnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan (syariat) ini, dan seruhlah (mereka) kepada Tuhanmu. Sungguh, engkau (Muhammad) berada di jalan yang lurus”*. (QS. Al-Hajj (22): 67).

<sup>7</sup> Lihat Budi Munawar Rahman dalam Pengantar bukunya M.Fathi Osman, *Islam, Pluralisme, dan Toleransi Keagamaan: Pandangan al-Quran, Kemanusiaan, Sejarah dan Peradaban*, (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad demokrasi, 2012),

<sup>8</sup> Rahman, Osman, *Islam, Pluralisme, dan Toleransi Keagamaan: Pandangan al-Quran, Kemanusiaan, Sejarah dan Peradaban, Islam, Pluralisme, dan Toleransi Keagamaan: Pandangan al-Quran, Kemanusiaan, Sejarah dan Peradaban*. xxiv.

melingkupinya. Karena prinsipnya, tak ada satupun agama di dunia ini yang vacuum budaya.

Distingsi atau keragaman ini bukan dijadikan untuk menilai kebenaran bersifat "klaim mutlak" yang berakibat menafikan dan menghakimi keberadaan agama atau golongan lain. Namun penilaian kebenaran, hakikatnya diserahkan pada Tuhan sebagai Maha Hakim (QS.2:113).<sup>8</sup> Sebab setiap golongan atau agama berhak menilai (klaim) kebenaran masing-masing ajarannya tanpa harus menafikan keberadaan agama lain yang punya klaim kebenaran yang sama.

c. Mengedepankan spirit dialog. QS. An-Nahl:125. *“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”*.

Dalam konteks hubungan antar agama, Islam menginstruksikan untuk membuka ruang dialog. Dialog yang dimaksud ialah mendiskusikan bukan hanya persamaan, namun juga perbedaannya dalam rangka melacak titik temu antar satu sama lain. Tata cara pembicaraannya pun dengan cara yang masuk di akal dan tetap menjunjung tinggi martabat dan kehormatan masing-masing sebagai wujud pengakuan kemajemukan (kebhinekaan). Untuk urusan-urusan duniawi, mereka dapat mencari penyelesaiannya dengan cara-cara musyawarah atau suara terbanyak

<sup>8</sup> *“dan orang Yahudi berkata, “orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu (pegangan),” dan orang-orang Nasrani (juga) berkata, “Orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu (pegangan), “padahal mereka membaca Kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari Kiamat, tentang apa yang mereka perselisihkan”*. (QS.Al-Baqarah (2): 113.

(demokrasi), tetapi urusan pilihan keyakinan teologis, setiap manusia wajib mendapatkan atmosfer kebebasan untuk memilihnya. Artinya, tak ada unsur pemaksaan dalam hal keyakinan teologis atas dasar suara terbanyak.

Berdialog antar agama atau golongan yang berbeda bisa diarahkan pada tema-tema "kebhinekaan", sekalian menepis semangat pemaksaan yang cenderung tak adil. Untuk itu seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, perlu adanya proses dialog yang konstruktif baik itu dari aspek metode maupun etika. Dengan begitu, proses berdialog yang bermartabat seperti itu tak memberikan ruang terhadap mereka yang sering mengutamakan pendapatnya lah yang paling benar secara absolut, dan seakan-akan mewakili seluruh kebenaran di jagat raya ini.

Klaim kebenaran (*truth claim*) setiap agama atau golongan dapat ditolerir sejauh tak menafikan kehadiran "yang lain" sebagai realitas yang harus dihormati dan diakui keberadaannya. Klaim kebenaran (*truth claim*) tak dijadikan sebagai sarana menghilangkan keberadaan "yang lain" dari muka bumi ini. Menjadi persoalan pelik dalam pertemuan antar agama atau golongan ketika sudah terbersit klaim kebenaran "mutlak/absolut" hanya dipihaknya. Padahal kebenaran mutlak/absolut hanya milik Tuhan Sang Pencipta. Logikanya, jika seseorang atau golongan tertentu yang merasa menggengam kebenaran mutlak, tanpa disadari ia menjadikan dirinya sebagai "tuhan-tuhan kecil" yang naif.

Dengan dialog, klaim kebenaran "mutlak/absolut" dapat diminimalisir dan menggapai pada spirit klaim kebenaran subyektif sesuai dengan kepercayaannya, sembari menyerahkan sepenuhnya nanti pada "pengadilan" Tuhan sebagai Maha Hakim. Manusia tidak memiliki otoritas menghakimi sesama atas dasar pemahaman dan keyakinan subyektifnya. Oleh sebab itu, dalam ikhtiar pencarian titik temu menjadi kaharusan

mengutamakan dialog konstruktif dan beretika demi menjalin keberlangsungan kehidupan masa depan manusia. Tanpa itu, populasi umat manusia akan terancam dan hanya tinggal menanti masa-masa kebinasaannya di muka bumi ini. Dalam hal ini seiring pernyataan Hans Kung, *“No peace among the nations without peace the religions; No peace among religions without dialog between the religions; No dialogue between religions without investigating the foundation of the religions”*<sup>9</sup>

d. Filosofi Pembebasan. QS.Al-Baqarah: 148.

*“dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”*.

Maksud tersirat dari ayat diatas menegaskan bahwa, prinsip pluralitas itu terefleksi dalam etos berlomba-lomba berbuat kebaikan di muka bumi. Guna mewujudkan hal itu diperlukan filosofi pembebasan dalam berkeyakinan (beragama). Dalam perspektif Islam, setiap manusia berhak (bebas) memilih agama yang diyakini. Tak ada tekanan dan paksaan dari luar dirinya untuk sebuah kepercayaan yang dianut.<sup>10</sup> Dengan demikian, semangat pembebasan menjadi bagian yang terpenting dalam Islam dengan memprioritaskan perbuatan kebajikan secara koeksistensi damai, dan berkeadilan.

Pada basisnya, Islam mengulurkan tawaran prinsip-prinsip general untuk cara hidup secara individu, keluarga, sosial, negara dan termasuk dunia demi menjamin terjaganya kestabilan, perdamaian, dan keadilan. Tetapi, Islam tidak selalu memaparkan secara detil dan teknis, disebabkan terdapat hal-hal yang terkait

<sup>9</sup> Lihat Hans Kung, *“Jalan Dialog dan Perspektif Muslim”*, CRCS-UGM, Yogyakarta, tt.

<sup>10</sup> *“Tidak ada paksaan dalam menganut agama, sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar pada thogut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha Mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah (2): 256.

keadaan ruang dan waktu. Maksudnya, manusia diberikan kebebasan "menterjemahkan" prinsip-prinsip itu sesuai dengan perubahan yang eksis di berbagai tempat. Islam mengesahkan ruang yang luas bagi kreativitas akal manusia sehingga merespon perubahan-perubahan yang berkembang. Hal ini dilatakankan bahwa akal manusia merupakan anugerah Tuhan yang wajib digunakan dan dikembangkan sesuai kehendak-Nya.

Berdasarkan hal tersebut, semakin memperkukuh bahwa pesan Islam terhadap pluralisme sebagai filosofi pembebasan manusia dari tindakan dehumanisasi atau eksploitasi manusia atas manusia. Amanat tersebut disampaikan oleh para utusan atau nabi-Nya terhadap para pengikutnya. Islam pun menegaskan setiap kaum atau golongan memiliki nabi, dan tak ada satu pun umat atau golongan, terkecuali telah pernah hadir kepadanya seorang pemberi peringatan yang membebaskan.<sup>11</sup> Para nabi diperintahkan Tuhan selain pemberi peringatan, juga sebagai pembawa kabar gembira.<sup>12</sup> Dengan demikian, peran dan fungsi kenabian di sini adalah membebaskan umat manusia dari ketertindasan, ketidakadilan, dan kejahatan kemanusiaan.

Para rasul itu diutus dengan bahasa kaumnya masing-masing (QS. 14:4),<sup>13</sup> namun

<sup>11</sup> *“Dan sungguh, Kami telah mengutus seseorang rasul untuk setiap umat (agar menyerukan), “Sembahlah Allah, dan jauhilah Thogut, kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan”.* (QS.An-Nahl (16):36)

<sup>12</sup> *“Sungguh, Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan”* (QS. Fatir (35):24.

<sup>13</sup> *“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa (budaya) kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka...”* (QS.Ibrahim (14): 4.

semuanya dengan tujuan yang sama, yaitu menurut istilah Cak Nur (Nurcholis Madjid) dan Fathi Osman yang dikutip Budi Munawarrahman mengajak umat manusia untuk “menempuh jalan kebenaran”, dengan inti pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan kewajiban menghambakan diri (beribadat) hanya kepada-Nya (QS. 21:25)<sup>14</sup>. Selain ajaran pokok Ketuhanan Yang Maha Esa (*tawhîd*) itu, para rasul dan nabi juga menyerukan perlawanan kepada *thâghûl*, yakni kekuatan jahat dan zalim (QS. 16:36), sebagai suatu segi ajaran sosial keagamaan yang membebaskan. Kaum beriman harus percaya kepada seluruh nabi dan rasul, tanpa membeda-bedakan seorang pun dari lainnya, dengan sikap berserah diri (*islâm*) kepada Tuhan (QS. 2:136, 285, dan 3: 84).<sup>15</sup> Oleh sebab itu sangat jelas, bahwa tak ada perbedaan substansial antara satu agama dengan agama lain di hadapan Tuhan atau Allah. Inilah yang mana oleh kaum

<sup>14</sup> “Dan Kami telah mengutus seorang rasul sebelum engkau (Muhammad), melainkan Kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak tuhan (yang berhak disembah) selain Aku, maka sembahlah Aku” (QS. Al-Anbiya (21):25).

<sup>15</sup> “Katakanlah, Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa, dan Isa serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepada-Nya”. (QS. Al-Baqarah (2): 136).

<sup>16</sup> *Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya (Al-Quran) dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata), “Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul-Nya. “Dan mereka berkata, Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami Ya Tuhan kami, dan kepada-Mu tempat (kami) kembali.”* (QS. Al-Baqarah (2):285).

<sup>17</sup> *Katakanlah (Muhammad), “Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya kami berserah diri”.* (QS. Ali Imran (3): 84).

pluralis disebut sebagai "argumen kesetaraan kaum beriman" di hadapan Tuhan.<sup>16</sup>

e. Pengakuan keberadaan "yang lain". QS. Al-Kafirun (109): 3-6) "...dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”

Dalam pandangan ini, Islam mengakui eksistensi "yang lain" yang berbeda. Pengakuan ini menunjukkan perilaku pluralisme dalam Islam yang sekaligus menolak sikap sektarian, parokial dan komunalistik berlebihan. Karena bisa jadi di antara agama atau kelompok "yang lain" terkandung nilai-nilai kebenaran yang dianutnya. Seperti yang telah disinggung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2): 62. “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi’in, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih”.

Perilaku mengakui eksistensi agama lain ialah bagian dari perintah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran (109:1-6). Perilaku seperti inilah yang dapat dikategorikan sebagai pluralisme. Hal ini mengisyaratkan adanya perilaku bersedia mengakui hak agama lain dengan berkoeksistensi damai, namun juga mengandung makna kesediaan berlaku adil terhadap mereka atas dasar mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan sejati. Karena berperilaku adil tanpa pandang agama, atau golongan manapun ialah perilaku mulia

<sup>16</sup> Budi Munawar Rahman, *Islam, Pluralisme, dan Toleransi Keagamaan: Pandangan al-Quran, Kemanusiaan, Sejarah dan Peradaban*, xxiv.

yang dicintai oleh Tuhan. Hal itupun berlaku sebaliknya. Pandangan ini diperkuat oleh dalil Al-Quran, *“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”*. (QS. Al-Mumtahanah (60): 8)

## 2. Islam dan Perubahan Sosial

Sementara itu kecenderungan dan intensitas perubahan pada aspek agama itu sendiri, dapat ditelaah melalui pengamatan yang serius, semisal agama Islam, baik melalui umatnya maupun kiprah agama Islam itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekilas terkesan kegairahan menghayati agama meningkat, terutama di kalangan masyarakat perkotaan yang nota-bene terdidik. Atau setidaknya pendidikan mereka relatif sudah mapan. Kenyataan ini tidak memberikan jaminan dan masih diragukan, apakah ini mencerminkan bertumbuhnya kekuatan agama (Islam) atau sebaliknya? Sebab hal ini berbarengan krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik (parpol) yang bernuansa agama (Islam) dan adanya "tekanan-tekanan" terhadap para penganutnya.

Oleh karena itu, keberagamaan seseorang tidak cukup hanya dipandang dari satu dimensi saja -- semisal dimensi ritual an-sich -- namun perlu pula melihat dari dimensi-dimensi lainnya seperti yang dipaparkan Glock dan Stark yang dikutip Riaz Hassan (2006). Menurut Glock dan Stark bahwa tidak mudah mengukur religiusitas seseorang ataupun komunitas (umat) pada setiap agama, sebab perlu pula memperhatikan hal-hal seperti: keanggotaan, kepercayaan pada doktrin agama, etika dan moralitas, pandangan dan cara hidup mereka. Namun hampir semua pakar ilmu agama-agama sependapat dengan lima dimensi dasar yang paling menonjol dalam setiap agama yang dapat dipakai untuk mengukur atau menguji kadar/mutu

keagamaan (religiusitas) seseorang. Kelima dimensi komitmen keagamaan (*dimensions of religious commitment*) Glock dan Stark itu adalah sbb:

1. Dimensi iman (*belief dimension*), yang mencakup harapan (ekspektasi) bahwa seorang pemeluk agama memahami dan menganut suatu pandangan teologis yang mengakibatkan dia mengakui dan menerima kebenaran agama tertentu.
2. Dimensi praktis keagamaan (*religious practice*), yang mencakup ibadah (*rituals*) dan devosi; menjadi keharusan yang wajib dipenuhi oleh setiap penganut agama.
3. Dimensi pengalaman keagamaan (*the experience dimension or religious experience*), yang mencakup kenyataan (realitas) bahwa semua agama punya harapan (ekspektasi) yang standard (umum) tetapi setiap pribadi penganutnya dapat memperoleh suatu pengalaman langsung dan pribadi (subyektif) dalam berkomunikasi dengan kenyataan (realitas) ultimate (supranatural) tersebut.
4. Dimensi pengetahuan (*the knowledge dimension*), yang melihat pada ekspektasi (harapan) bahwa penganut agama tertentu hendaknya mempunyai pengetahuan minimum mengenai hal-hal pokok dalam agama: iman, ritus, Kitab Suci dan tradisi. Dimensi iman dan pengetahuan memiliki hubungan timbal balik, yang mempengaruhi sikap hidup dalam penghayatan agamanya setiap hari.
5. Dimensi konsekwensi sosial (*the consequences dimension*). Dimensi ini mengidentifikasi efek dari keempat dimensi diatas dalam praktek, pengalaman serta kehidupan sehari-hari.

Kelima dimensi keberagamaan diatas nampaknya dapat dijadikan tolak ukur dalam mengkaji seberapa jauh religiusitas seseorang ataupun kelompok. Meskipun dirasakan tidak mudah dalam mengkaji keberagamaan

seseorang melalui pendekatan ilmiah. Namun pendekatan yang ditawarkan Glock dan Strak cenderung fenomenologis yang sarat dengan keterlibatan langsung peneliti ataupun pengkaji di lapangan. Dalam konteks ini, keberagamaan bukan hanya diukur dari dimensi tertentu saja, tapi beberapa dimensi yang terkait dengan pengalaman spiritualitas seseorang. Bagi sebagian pakar ilmu agama, menjadi seseorang beragama tidak sekedar melaksanakan perilaku-prilaku ritual semata, namun keterlibatan aspek etika dan perilaku yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan adalah sebuah kemestian.

Indikasi ini lebih diperkuat dengan cara menghayati agama, di mana penghayatan dirasakan cukup apabila sudah melaksanakan kewajiban pribadinya dalam beribadah ritual. Sedangkan tanggung jawab sosialnya kurang mendapat perhatian. Padahal semestinya ajaran agama bukan sekedar ibadah individu kepada Tuhan akan tetapi kewajiban kerja kemanusiaan atau amal shaleh dalam agama (Islam) lebih ditekankan. Kemungkinan hal ini bisa menjadi sebuah gambaran dari fenomena keberagamaan, namun tidak berarti sinonim dan linier. Arti lain, bila seseorang religius dalam satu aspek, bukan berarti ia pun religius di aspek yang lain.

Menurut Mircea Eliade (1987) bahwa keberagamaan dalam bentuk nyata (kultus), adalah bentuk tanggapan total, mendalam dan integrasi atas Realitas Mutlak. Bentuk perbuatan nyata yang dimaksudkan adalah peribadatan dan pelayanan ini menjelaskan keseimbangan antara lahir dan batin. Artinya, dalam pengalaman keagamaan jenis ini mengungkapkan tentang pengalaman manusia yang utuh dimana akal, jiwa dan badan mengintegrasikan. Dengan demikian, wujud ibadah adalah perbuatan yang tertinggi dalam kehidupan seseorang manusia untuk menghadap Realitas Mutlak dengan cara memuja (sembayang atau ibadah ritual). Rudolf Otto menjelaskan, bahwa menjalankan ibadah itu dengan cara memusatkan pikiran dan merenungkan kehadiran Tuhan atau dengan berterimakasih kepadaNya menandakan kita memberikan apresiasi yang tinggi

kepada kekuasaan yang sarat dengan pemujaan. Refleksi pemujaan itu bagian dari rasa hormat yang mendalam untuk menuju "titik tertinggi" dalam suasana fikiran terstruktur dari rasa kagum, takut, segan dan mungkin cinta. Biasanya, pengalaman tersebut dapat dilihat dalam tradisi sufi tatkala mereka sedang "ekstase" baik ketika sholat atau kontemplasi. Van der Leeuw yang dikutip Joachim Wach (1944), mengemukakan bahwa dalam ibadah, manusia seakan-akan menjadi dirinya yang utuh tatkala menghadap Realitas Mutlak. Ketika dia memohon kepada Tuhan, dia menghubungkan dirinya dengan sesuatu pusat kekuatan tempat dia mencari kekuatan, perlindungan, dan inspirasi. Tujuan utama dari pengalaman ibadah ini adalah konsekstrasi, yaitu adanya perubahan dari semua wujud baik konkrit maupun abstrak agar serasi dengan tatanan alam dan kehendak Tuhan.

Merujuk pada perspektif di atas, perubahan sosial di Indonesia sam sekarang pun seiring dengan irama perjalanan sejarahnya, yakni melingkupi bidang agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan berbagai bidang kehidupan yang lain. Perwujudan yang kongkrit dari perubahan tersebut, adalah berupa upaya pembangunan yang terencana, terhitung di dalamnya sumber daya manusia. Namun dalam implementasinya, proses pembangunan tak jarang menimbulkan disorientasi, seperti alienasi (keterasingan dan kerenggangan) dan dehumanisasi ("penjungkirbalikan" nilai-nilai kemanusiaan) bahkan konflik horisontal.

Hal ini sejalan dengan pandangan Faisal Ismail (2001), bahwa alienasi tersebut terkait hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya. Semua itu, dampak dari pola pembangunan yang lebih memprioritaskan aspek fisik atau kebendaan semata. Dehumanisasi semakin marak dari proses pembangunan yang mengutamakan praktis-pragmatis di atas nilai-nilai kemanusiaan. Manusia tak lebih dari obyek pembangunan daripada subyek pembangunan.

Kenyataan ini, pada kesempatannya dapat menciptakan semangat penolakan dan perlawanan dari pihak yang merasa dimarginalkan. Konteks sosiologis menjelaskan bahwa semakin kuatnya tekanan terhadap eksistensi kelompok tertentu, maka akan semakin mempercepat timbulnya semangat militansi untuk menjaga eksistensinya. Begitu pula di Indonesia, semakin represif para penguasa (seperti di era rezim Orba) menyekat aktivitas umat Islam, semakin tumbuh subur timbulnya aliran-aliran yang bernuansa radikalisme. Perubahan yang diinginkan oleh kelompok radikal keagamaan, umumnya cenderung revolusioner dan mendasar. Mereka berpandangan, bahwa dengan merubah secara mendasar seluruh aspek kehidupan manusia dan sekaligus melawan dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, ialah sesuatu perwujudan kewajiban religius yang harus dilaksanakan.

Pada hakikatnya Islam menghendaki adanya perubahan dalam setiap kehidupan manusia. Islam dan perubahan merupakan dua entitas yang tidak berdiri masing-masing. Keduanya itu saling melengkapi (*complementary*), dan bahkan saling mensifati satu sama lain. Dapat pula, "agama" dan "perubahan" dimengerti sebagai hal yang *overlapping*. Artinya, "perubahan" dalam pandangan sebagian kalangan, justru dianggap sebagai inti ajaran agama. Sebagian pengiat sosiologi dan sosiologi agama, seperti Max Weber, Ibnu Khaldun, Emile Durkheim, Peter L. Berger, Robert N. Bellah, Ali Syariaty, dan yang lainnya menyiratkan pandangannya tentang hubungan antara agama (Islam) dan perubahan sosial.

Makna "perubahan" lantas dirumuskan oleh agama setidaknya Islam, sebagai kewajiban universal meminjam istilah Islam *sunnahtullah* supaya dapat merubah dari keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, ketertindasan dan dari berbagai macam yang bersifat dehumanisasi menuju terwujudnya masyarakat/umat yang berprikemanusiaan dan berperadaban. Setidaknya, agama mendidik

terhadap nilai-nilai seperti itu, selain doktrin-doktrin yang bersifat ritual. Karena, dapat dibayangkan apabila kehadiran agama di tengah-tengah hingar-bingarnya akselerasi kehidupan manusia tidak bisa menawarkan semangat perubahan, maka keberadaan agama akan menjadi pudar. Dengan kata lain, jika sudah demikian, tidak mustahil agama secara kelembagaan akan ditinggalkan oleh umatnya dan boleh jadi belakangan menjadi "gulung tikar" karena diasumsikan sudah tidak *up to date*.

Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman diskursus "agama" di satu sisi, dan "perubahan" di sisi lain sebagai bagian satu entitas yang tak dapat dipisahkan sebab yang satu mensifati yang lain. "Perubahan" berfungsi sebagai sifat "kecenderungan", "titik tekan", atau "melingkupi" keberadaan agama. Ilustrasi ini dapat diambil contoh dari berbagai peristiwa di belahan dunia tentang perubahan sosial yang diakibatkan eksese dari agama, seperti, gerakan Protestan Lutheranian, revolusi Islam Iran, atau belakangan kasus-kasus kekerasan atas nama Agama di Timur Tengah. Setidaknya, agama (Islam) hadir diberbagai belahan dunia senantiasa memberikan efek perubahan yang cukup signifikan. Bukan hanya bersifat regresif, tapi tidak sedikit jumlahnya perubahan ke arah progresif mewarnai kehidupan umat manusia di dunia.

Identifikasi di atas tak hanya difokuskan pada perubahan yang bertujuan progress (arah kemajuan) semata, tetapi ke arah regress (kemunduran) pun memikat untuk dijadikan contoh. Memang tak selamanya perubahan yang diakibatkan sepak terjang agama bisa berdampak pada kemajuan peradaban bagi manusia. Tak sedikit perubahan yang mengarah pada kemunduran (*regress*) sebuah peradaban bangsa tertentu yakni, seperti terjadinya perang Salib (Holy War antara Islam dan Kristen) ataupun konflik-konflik yang mengatasnamakan agama.

Sementara perubahan yang berorientasi pada kemajuan (*progress*) peradaban manusia, posisi agama pun menyampaikan kontribusi

yang sangat besar. Dengan agama, manusia dapat menyebarkan perdamaian dan cinta kasih di antara sesama, optimis dalam menatap masa depan, menciptakan alat-alat teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan, menegakkan keadilan, sekaligus pemihakan terhadap golongan lemah. Tanpa itu, bisa dipastikan semakin lama sesuai dengan tuntutan zaman, agama akan ditinggalkan oleh penganutnya dan pada akhirnya "gulung tikar" seperti yang dialami oleh agama-agama Mesir kuno. Meskipun acap kali tak mudah untuk mensosialisasikan agama sebagai bagian dari spirit proses perubahan sosial.

Adalah ilustrasi yang menarik dari beberapa contoh kasus di Indonesia ialah, perubahan sosial yang dilandasi oleh spirit keagamaan seringkali menghadirkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat beranggapan, bahwa agama semestinya banyak mengambil peran dalam berbagai aspek, terutama dalam rangka pengendalian masyarakat (*social control*). Mereka berdalih, secara common-sense menjadi lumrah kalau agama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berbagai aktivitas kehidupan sosial di Indonesia. Kenapa? Sebab mayoritas rakyat Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Kemudian masalah berkembang, yakni agama mana yang layak menjadi dominan/mayoritas mempengaruhi pola perilaku masyarakat? Pernyataan terakhir ini, bisa didiskusikan dalam konteks logika kekuasaan dengan lebih intens.

Sedangkan bagi sebagian masyarakat yang tidak menginginkan agama hadir di berbagai moment, beranggapan, agama ialah urusan privat dan sangat personal. Kegiatan yang berkaitan dengan persoalan seperti, politik, ekonomi, budaya, dan semua yang ada kaitannya dengan publik, maka tak menjadi kemestian agama dilibatkan, apalagi agama tertentu. Contohnya kasus RUU APP, poligami dan lain sebagainya, adalah potret fenomena komunitas yang berjaran perlunya pemisahan antara urusan agama, dan urusan sosial di sisi lain. Komunitas ini berpendapat,

untuk menjaga keutuhan bangsa dan semangat nasionalisme tidak diperlukan kehadiran agama atau aliran apapun dalam konstelasi pembangunan negara-bangsa. Apalagi Indonesia dalam pendapat mereka, tidak mengenal paham teokrasi (negara agama). Fenomena belakangan ini mengingatkan kita pada pengalaman di negara-negara Eropa yang berupaya memisahkan agama dalam ranah privat di satu sisi, dan ranah negara di sisi yang lain.

"Dalam pengalaman Eropa," tulis Yudi Latif, munculnya nasionalisme (sekular) berbarengan dengan pudarnya pengaruh agama. Di bagian dunia yang lain, seperti Asia, ketika nasionalisme 'bergerak' dan menyelimuti wilayah-wilayah ini, isu agama juga bergerak maju". Meski demikian, Yudi yang mengutip Rupert Emerson buru-buru mengantisipasi bahwa "isu agama" tidak akan pernah lagi menghalangi gerak maju nasionalisme sekular yang dianggap sebagai hadiah Barat kepada dunia (Yudi Latif 2008:).

Dalam pandangan ini, nasionalisme tidak hanya dipahami sebagai ideologi politik sekular dan identitas nasional netral secara religius, tetapi juga bentuk organisasi politik tertentu, negara-bangsa dalam pengalaman Eropa dan Amerika. Dalam organisasi semacam itu, individu-individu diikat oleh sistem politik demokratis yang terpusat, menyeluruh, dan tidak dipengaruhi oleh pertalian-pertalian etnik, kultural, atau religius apa pun (Juergensmeyer, 1998).

Sejarah peperangan dan kekerasan negara atas nama agama dalam bentangan panjang historis Eropa diselesaikan dengan cara pemisahan antara agama dan negara. Agama dilucuti dari ruang publik (*disestablishment*) untuk dibatasi perannya di ranah privat. Berbarengan dengan itu, teori-teori modernisasi sebagai produk pencerahan juga menisbatkan "sekularisasi" sebagai bagian inheren dari modernitas. Paham Darwanisme sosial berasumsi bahwa agama dan modernisasi berjalan dalam relasi yang kontradiktif; seiring dengan kemunculan masyarakat saintifik dan industrial, keyakinan

dan kepatuhan keagamaan menurun (Turner 1996).

Yang menjadi masalah kemudian adalah, apakah keberadaan agama cukup dihadirkan hanya dalam urusan yang sifatnya privat/personal dan domestik. Dengan demikian, jargon keutuhan bangsa ialah harga mati dan mutlak wajib dikedepankan ketimbang menjadikan agama tertentu sebagai arahan atau norma pergaulan sosial. Ataukah dengan memunculkan agama sebagai landasan norma bernegara dan berkebangsaan dapat menjamin akan adanya keadilan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Untuk memastikan survival-nya di antara kedua ajaran ini, sebetulnya lebih ditentukan oleh "seleksi alam", artinya, paham mana yang dapat menjamin keadilan, ketertiban dan kelangsungan hidup masyarakat pada umumnya dan paham mana yang hanya sebatas pseudo-ideologi semata.

Dalam konteks pergolakan politik di Indonesia, akhir-akhir ini banyak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Semenjak pasca Orba, kehadiran partai politik yang bernuansa agama bermunculan bagai jamur di musim hujan. Kebanyakan mereka berpikiran bahwa, "idealisme-religiusitas" akan bisa digulirkan apabila memaksimalkan partisipasi politik secara langsung. Bagi mereka, pelajaran paling berharga adalah marginalisasi aspirasi politik partai bernuansa agama di era Orba. Oleh sebab itu, peluang di era reformasi ini mesti dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menciptakan "obsesi" berpolitik dengan melibatkan agama secara eksplisit.

Terlepas dari apakah ada eksistensi partai politik aliran ini, hanya sekedar menarik minat partisipasi masyarakat beragama untuk kepentingan kekuasaan golongan tertentu atau murni untuk mewujudkan sebuah refleksi semangat religiusitas. Tujuan dari dugaan terakhir ini adalah, mendirikan partai politik agama dalam rangka merubah eksistensi masyarakat dengan nilai-nilai agama sebagai sumber utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang jelas, dari mulai partisipasi

politik keagamaan dilembagakan, memberikan warna tersendiri dalam percaturan politik di Indonesia. Setidaknya dalam konteks demokrasi modern, fenomena yang demikian ini menjadi "batu uji" sebuah makna sejati dari demokrasi dan partisipasi parpol keagamaan.

Masalah lain yang tak kalah pentingnya untuk dimusyawarahkan ialah, Indonesia yang dikenal mayoritas beragama, perilaku beragama tersebut belum nampak dalam perilaku sehari-hari. Mungkin agama hanya sebatas identitas formalistis semata (melengkapi administrasi kependudukan). Pernyataan ini nampaknya "sumir" dan "sinisme" bagi masyarakat beragama pada biasanya. Namun ditilik dari kenyataan yang berkembang, banyak indikasi yang mendukung penjelasan ini, semisal merebaknya kasus KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di seantero Nusantara. Sementara "oknum" yang melangsungkan praktek KKN notabene beragama, bahkan mungkin lebih terdidik. Hal ini menandakan bahwa "nafsu sahwat" materialisme lebih dominan dibanding semangat keberagamaan. Dari penjelasan yang demikian ini, ternyata keberadaan agama di Indonesia belum dapat mengejawantah dalam proses perubahan sosial ke arah yang lebih progresif atau lebih baik.

Atas basis demikian, proses perubahan sosial tak dapat dilepaskan dari tanggung jawab semua masyarakatnya, terutama para penganut agama. Dalam perspektif sosiologis (fungsional-struktural), merubah masyarakat ke arah yang lebih produktif dan baik, ialah sebuah kewajiban yang tidak dapat dihindari. Dengan kata lain, umat beragama (Islam) dengan semangat dogmanya, bukan saja memikul tanggung jawab untuk mempererat nilai-nilai moral, etik dan spiritual sebagai dasar pembangunan, namun juga dituntut untuk memerankan fungsi korektif, inspiratif, integratif dan kreatif agama ke dalam proses keharmonisan sosial. Berkaitan dengan itu, tugas merubah kondisi sosial ke arah yang lebih baik, bukan sekedar sebagai tugas kemanusiaan, akan tetapi sekaligus menjadi

pengamalan sejati ajaran Islam sebagai agama penebar kasih sayang (*rahmantan lil alamin*).

### C. SIMPULAN

Prinsip dasar dalam Islam setelah *Tawhid* (monotheis), ialah etos *Rahmattan lil alamin* (menebar kasih-sayang di seluruh alam), sebagai ekspresi amal shaleh (kerja kemanusiaan). Menebar kasih sayang ini merupakan bentuk lain dari semangat pluralisme yang didalamnya mengandung spirit kemanusiaan universal, dengan menjunjung tinggi keanekaragaman yang ada, terutama dalam konteks keindonesiaan.

Alhasil, pluralisme merupakan suatu kewajiban bagi keselamatan umat manusia, antara lain melewati mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*checks and balances*). Dalam Al-Quran telah disebutkan, bahwa Tuhan menciptakan mekanisme pengawasan dan pengimbangan antar sesama manusia untuk menjaga keutuhan bumi dan menjadi salah satu wujud ke-Mahamurahan Tuhan terhadap umat manusia. Seandainya Tuhan tidak mengimbangi sekelompok manusia dengan kelompok lain, pastilah bumi ini akan segera musnah. Namun Tuhan memiliki kemurahan yang melimpah terhadap seluruh alam, supaya bumi dan isinya tetap terawat dengan baik. Maka disinilah perlunya prinsip pluralisme menjadi bagian terpenting untuk seluruh umat manusia sebagai modal koeksistensi damai di muka bumi. Dan sesungguhnya pluralisme ialah sebuah proses hukum alam (*Sunatullah*) yang tidak akan berubah – konsekuensinya, tidak mungkin diabaikan ataupun diingkari.

Kemudian, tak ada kalimat yang indah dalam hidup ini kecuali kalimat "indahnyanya kebersamaan" di negeri yang kaya akan keanekaragaman budaya dan agama. Hal ini dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan rancangan negara Indonesia yang lebih demokratis dan pluralis bukan menghidupkan budaya feodal, parokial dan eksklusif.

Untuk memandu ke arah Indonesia yang lebih demokratis, dan menghargai kebhinekaan yang otentik, serta berkeadaban - semua warga bangsa tanpa terkecuali merawat semangat koeksistensi damai yang berkeadilan. Tanpa modal itu, dapat dipastikan republik ini akan mejumpai keadaan carut-marut yang tak berkesudahan. Oleh karenanya, diperlukan keteguhan dalam mewujudkan spirit kesatuan dalam kebhinekaan atau kemufakatan dalam perbedaan dengan didukung penuh teristimewa oleh para tokoh agamawan, cendekiawan, dan negara (pemerintah).

Terakhir, proses perubahan sosial tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab seluruh masyarakatnya, terutama umat Islam. Ajaran Islam, dalam merubah masyarakat ke arah yang lebih baik dan produktif, merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat dihindari. Makna lain, umat Islam di mana pun berada, bukan saja memikul tanggung jawab untuk memperkuat nilai-nilai moral, etik dan spiritual sebagai landasan perubahan, tetapi juga dituntut untuk memerankan fungsi inspiratif, korektif, kreatif dan integratif ajaran agama ke dalam proses keharmonisan sosial. Lebih penting lagi, kewajiban untuk merubah kondisi sosial ke arah yang lebih baik, bukan sekedar sebagai darma kemanusiaan, akan tetapi sekaligus sebagai pengamalan sejati ajaran Islam sebagai agama penebar kasih sayang (*rahmantan lil alamin*). *Wallahualam*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Munawar Rahman, Budi, Osman, M.Fathi. Pengantar Islam, *Pluralisme, dan Toleransi Keagamaan: Pandangan al-Quran, Kemanusiaan, Sejarah dan Peradaban*, Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad demokrasi, 2012.
- Ismail, Faisal. *Islam Transformasi Sosial dan Kontinuitas Sejarah*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2001.
- Kung, Hans. *Jalan Dialog dan Perspektif Muslim*, Yogyakarta: CRCS-UGM, tt.

- Wach, Joachim. *Sociology Of Religion*, Chicago: University of Chicago Press, 1944
- Juergensmeyer, M. *Menentang Negara Sekuler: Kebangkitan Global Nasionalisme Religius*, Bandung: Mizan, 1998.
- Eliade, Mircea. *The Sacred & The Profane", The Nature of Religion*, Orlando Florida: Harcourt Brace Jovanovich Publisher, 1987.
- S.Ellwood, Robert, and Gregory, "The Encyclopedia of World Religions", New York: DWJ Book, 2007.
- Hassan, Riaz. *Keberagamaan Iman: Studi Komperatif Masyarakat Muslim*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- B. S, Turner. *Orientalism, Postmodernism & Globalism*, London: Routledge, 1996.
- Latif, Yudi. *Menuju Sekularisme Religius: Membaca Sejarah dari Tengah*, Bandung : Makalah disampaikan dalam Diskusi Rutin Yayasan Ulul Albab, 2008.